



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) T.A 2022



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 telah selesai disusun.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta berusaha menyajikan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan dan tantangan yang ada, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

1. Pendahuluan, yang menyajikan gambaran umum organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta mandat yang diemban;
2. Rencana Strategis, yang menyajikan uraian singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja;
3. Akuntabilitas Kinerja, yang menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja;
4. Penutup, yang menyajikan tinjauan secara umum mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan serta kendala utama yang berkaitan dengan kinerja.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah mendukung dan membantu proses penyusunan laporan ini.

Jakarta, 30 Januari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Isnawa Adji
Drs. Isnawa Adji, M.A.P.
NIP 197205241992031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Capaian kinerja Tahun 2022 dapat dikatakan berhasil dilihat dari Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan dimana realiasi yang mencapai target.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Tabel Capaian Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Sasaran Strategis				
1.	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana.	Indeks Risiko Bencana	66,33	62,58
		Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan	2,1	2,3
2	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	93,14%
4	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak nomor (13)	100%	100%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor(39)	100%	100%
		Realisasi rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61)	100%	100%
6	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah (67)	100%	100%

7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim nomor (72)	100%	100%
Sasaran khusus				
8	Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3 (WTP)	3 (WTP)
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	91	92,91
13	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMP RB Perangkat Daerah Tahun 2022	95%	N/A
14	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Prosentase Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100%	100%
15	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	100%
Sasaran Operasional				
16	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%

16	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%
----	--	---	------	------

Secara keseluruhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 telah menganggarkan pembiayaan seluruh program dan kegiatannya sebesar Rp. 81.174.241.198,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 75.605.200.729,- atau 93,14 %. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) program yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penanggulangan Bencana BPBD memiliki 3 (tiga) Kegiatan dan 10 (Sepuluh) Sub Kegiatan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BPBD memiliki 5 (lima) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan.
- Program Penanggulangan Bencana UPT PDIK memiliki 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT PDIK memiliki 5 (lima) Kegiatan dan 11 (Sebelas) Sub Kegiatan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 terpenuhi sesuai dengan target dan realisasi Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) juga memenuhi target yang telah ditentukan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Kedudukan.....	7
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
1.3.1. Tugas Pokok	7
1.3.2. Fungsi.....	8
1.4. Struktur Organisasi	8
1.5. Sumber Daya Manusia	10
1.6. Isu Strategis	11
1.6. Maksud dan Tujuan Penulisan LKIP	14
1.7. Sistematika Penulisan LKIP	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
2.1. Perencanaan	15
2.1.1 RPJMD 2017-2022	16
2.1.2 Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.....	18
2.2. Perjanjian Kinerja	25
2.1.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	39
3.3. Indikator Penunjang Lainnya.....	41
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi	43
3.5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....	45
3.6. Realisasi Anggaran	46
3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	46
3.8. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
3.9. Perbandingan Dengan Target Nasional	48
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1. Kesimpulan.....	49
4.2. Saran	49
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, memiliki karakteristik kekhususan tersendiri dibandingkan dengan daerah provinsi lainnya. Kompleksitas Jakarta selalu berkaitan erat dengan keberadaan sebagai pusat pemerintahan, faktor luas wilayah yang terbatas dan populasi penduduk yang tinggi.

Dalam upaya meningkatkan keharmonisan Masyarakat Jakarta maka diperlukan pengelolaan pemerintahan yang efisien, bersih dan bertanggung jawab untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tugas-tugas tersebut dijabarkan dalam penetapan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan Tujuan Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui suatu mekanisme pertanggungjawaban yang sistematis yaitu pelaksanaan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dilihat dari topografi wilayah Provinsi DKI Jakarta dikategorikan sebagai daerah datar dan landai. Di daerah bagian utara dan pusat memiliki topografi yang relatif datar memiliki kemiringan di antara 0° dan 2°, sedangkan di daerah bagian selatan memiliki kemiringan topografi di atas 5°. Ketinggian tanah dari pantai sampai ke banjir kanal berkisar antara 0 m sampai 10 m di atas permukaan laut diukur dari titik nol Tanjung Priok. Sedangkan dari banjir kanal sampai batas paling Selatan dari wilayah Provinsi DKI Jakarta antara 5 m sampai 50 m di atas permukaan laut.

Daerah pantai merupakan daerah rawa atau daerah yang selalu tergenang air pada musim hujan. Di daerah bagian Selatan banjir kanal terdapat perbukitan rendah dengan ketinggian antara 50 m sampai 75 m. Sungai-sungai yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta antara lain : Sungai Grogol, Sungai Krukut, Sungai Angke, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Sunter.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Banjir di Provinsi DKI Jakarta, disebutkan terdapat 25 Kelurahan berpotensi mengalami banjir dan dapat menimbulkan kerugian serta adanya pengungsian. Menyikapi hal tersebut maka diperlukan upaya penanggulangan sejak dari pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

1.2 Kedudukan

Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur Perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku *ex-officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sedangkan untuk pelaksanaan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, tanggap darurat dan pasca

bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana di Daerah;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.2. Fungsi

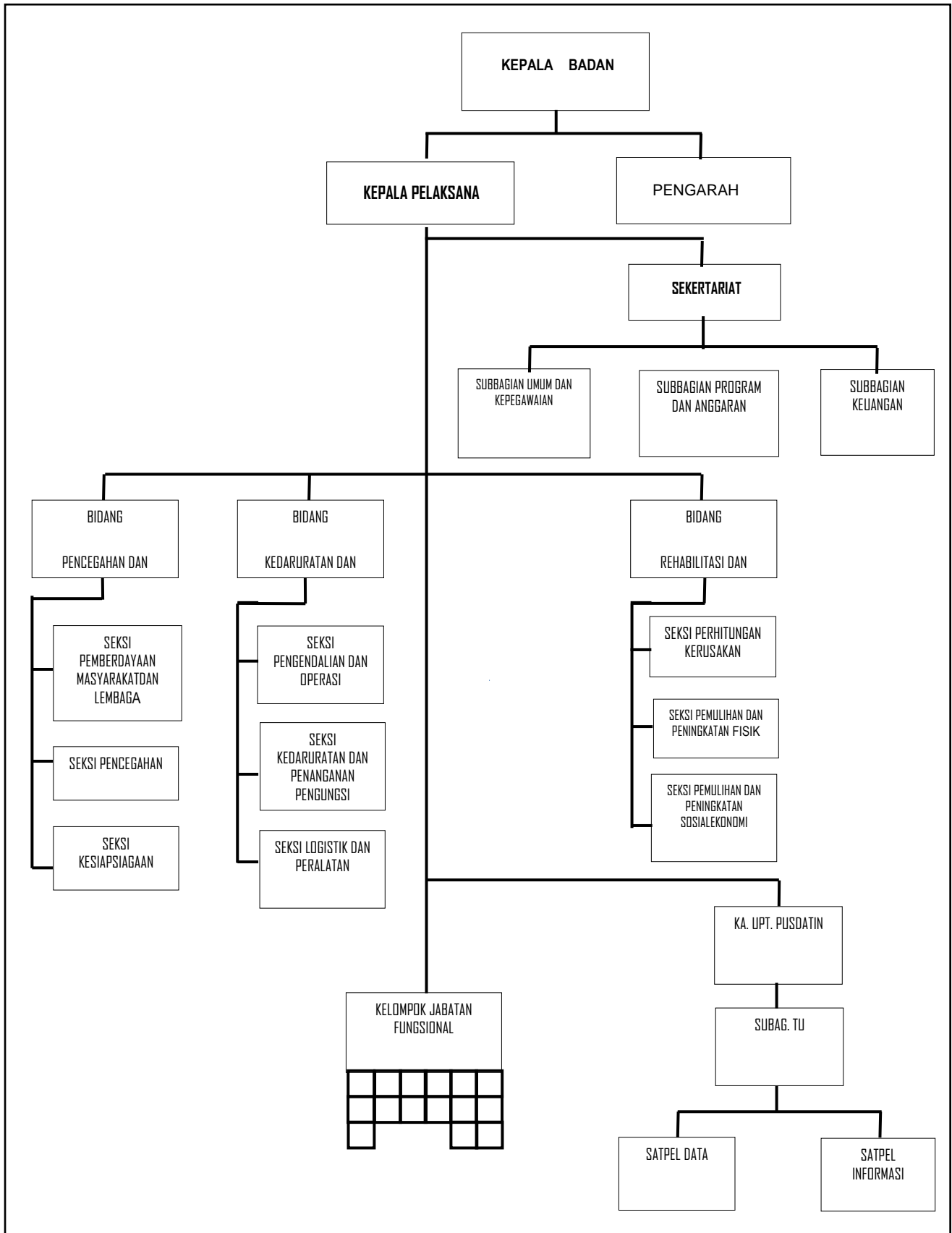
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat digambarkan pada gambar berikut :

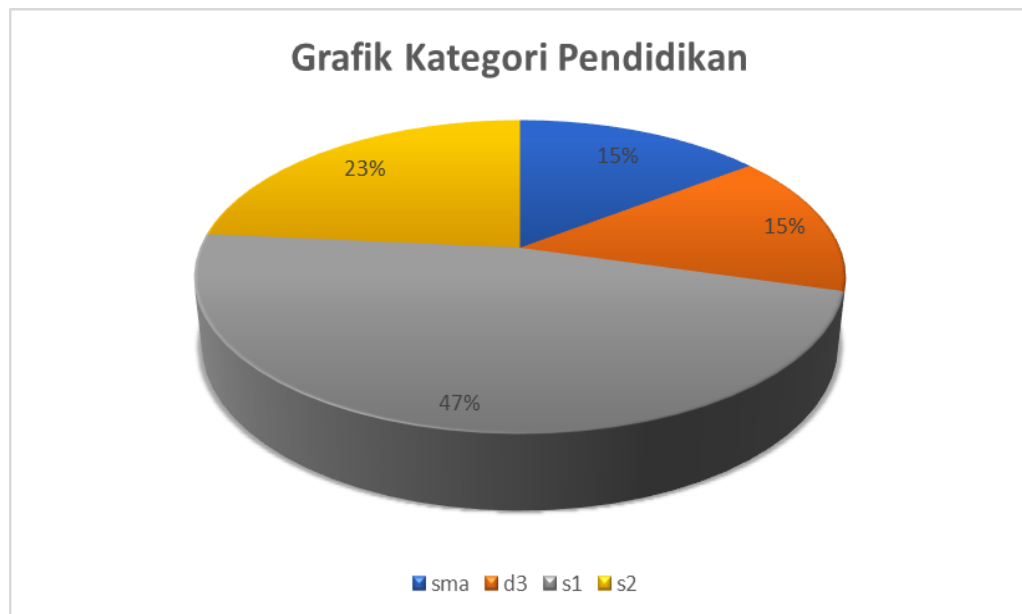
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi DKI Jakarta



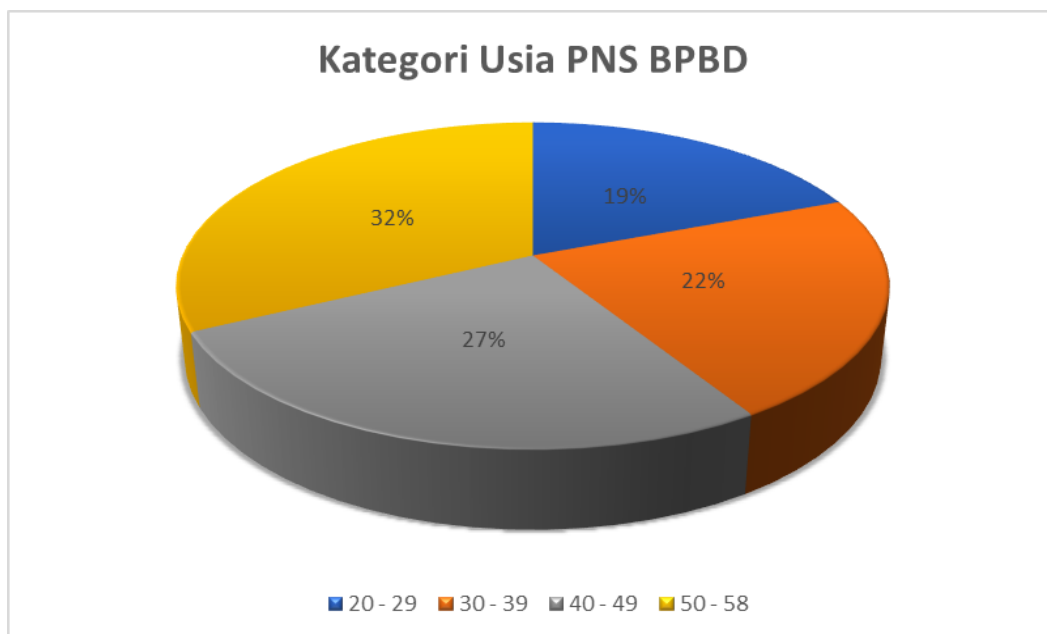
Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dijabarkan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang dikelompokkan ke dalam Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.

1.5. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 terdiri dari Aparatur Sipil Negara BPBD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 62 orang dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebanyak 327 orang.



Distribusi pegawai BPBD Provinsi DKI Jakarta menurut tingkat pendidikan menunjukkan sebagian besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas dengan proporsi: S1 sebesar 47 persen, S2 sebesar 23 persen. Dengan kata lain, 70 persen pegawai BPBD adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 sehingga memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan terutama dalam menggunakan data dan informasi, menemukan masalah, dan membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



Pegawai BPBD Provinsi DKI Jakarta yang berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun, yaitu 32 persen atau 22 orang. Sedangkan kelompok umur yang paling banyak adalah kelompok umur 20 - 49 tahun, yaitu sebesar 68 persen. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki BPBD dan masih dimungkinkan dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana.

1.6. Isu Strategis

1. Kurangnya kesadaran/pemahaman aparat dan masyarakat terhadap ancaman bencana.

Permasalahan Jakarta yang sangat kompleks, seperti kepadatan penduduk, topografi wilayah 40 % berada dibawah permukaan laut, merupakan lintasan ring fire, perlintasan beberapa aliran sungai dari hulu ke hilir, menjadikan Jakarta rentan terhadap bencana. Kerentanan ini tidak diimbangi dengan kemampuan aparat dan masyarakat Jakarta untuk mengurangi resiko bencana. Masih banyaknya masyarakat Jakarta yang masih berada disepanjang pinggiran sungai yang melintas ditambah beban kepadatan penduduk yang sering mengakibatkan tingginya potensi terjadinya bencana

2. Masih rendahnya kebijakan penanggulangan bencana daerah

Keberhasilan penanggulangan bencana dapat dicapai dengan adanya kolaborasi pelaksanaan antara Pemerintah, Masyarakat dan

Lembaga Usaha. Tidak berjalan sektoral, tetapi bekerja bergandengan tangan dan satu konsep pola pikir, agar pencapaian penanggulangan bencana tersebut tidak sektoral akan tetapi masing-masing pihak memahami hak, kewenangan dan kewajibannya didalam pengelolaan penanggulangan bencana. Untuk mengatur hak, kewenangan dan kewajiban ini perlu ada legalitas Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan bencana dari tingkat provinsi sampai ke tingkat yang paling bawah, sehingga jelas siapa berbuat apa, tidak terdapat duplikasi kewenangan, hak dan kewajiban.

3. *Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan.*

Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta *ex office* Sekretaris Daerah, hal ini mengamanatkan bahwa seluruh SKPD terkait tugas dan fungsi penanggulangan bencana berada dibawah Kepala BPBD. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian tugas SKPD/UKPD terkait penanggulangan bencana sudah mengatur semua tugas-tugas SKPD/UKPD tersebut dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Namun demikian tugas-tugas tersebut belum dilakukan secara optimal, masih diperlukan penegasan tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD di lapangan yang dikoordinasikan oleh BPBD. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 juga perlu dilakukan revisi nomenklatur SKPD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

4. *Penyelenggaraan penanggulangan bencana masih bersifat sektoral.*

BPBD Provinsi DKI Jakarta terbentuk melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2011 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebelum tahun 2011, penanggulangan bencana dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsinya, sehingga setiap perangkat daerah sudah memiliki sumber daya yang handal dalam pelaksanaan tugasnya. Karena perangkat daerah sudah melakukan tugas nya dengan baik sesuai SOP, maka kehadiran

BPBD dititikberatkan kepada fungsi koordinasi dan komando, tugas pelaksana hanya sebagai pendukung.

5. *Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana secara sistematis, terintegrasi, dan akurat*

Data dan Informasi bencana merupakan data yang sangat penting dikonsumsi masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Data yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga perlu proses verifikasi, agar informasi yang disampaikan tepat, akurat dan cepat. Informasi yang diterima oleh masyarakat bersumber dari berbagai instansi atau lembaga, sehingga sering terjadi kesimpangsiuran informasi yang berakibat kesalahan didalam melakukan penanganan.

6. *Belum seluruhnya pemilik dan pengelola gedung tinggi memahami risiko/ ancaman bencana pada gedung bertingkat.*

Ancaman bencana terhadap gedung tinggi merupakan perhatian yang sangat serius, mengingat jumlah \pm 1.060 gedung bertingkat di DKI Jakarta, belum memahami penyelamatan diri terhadap ancaman bencana kebakaran dan gempa bumi. Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Rambu Kebencanaan Dan Sistem Penanggulangan Bencana Pada Gedung belum diterapkan secara maksimal pada Gedung Bertingkat. Ancaman bencana kebakaran dan gempa bumi pada Gedung tidak dapat diprediksi kejadiannya, dapat dibayangkan kalau terjadi pada siang hari, berapa banyak nyawa yang terancam yang perlu diselamatkan.

7. *Rendahnya kapasitas teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana*

Terdapat 25 Kelurahan titik rawan banjir dan 55 Kelurahan titik rawan kebakaran di Wilayah DKI Jakarta. Di lokasi titik rawan ini sering terjadi bencana secara berulang-ulang, sehingga diperlukan kapasitas teknis penyelamatan dan pertolongan korban bencana baik dari aparat maupun masyarakat. Ketersediaan aparat dan masyarakat ini harus diberi dan ditingkatkan kemampuan kapasitasnya secara terus menerus, karena secara generasi, pergantian tersebut juga harus diperhatikan dan diganti, agar penanganan dapat terlaksana dengan maksimal.

1.6 Maksud dan Tujuan Penulisan LKIP

Maksud penyusunan LKIP tahun 2022 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi pertanggung jawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Untuk mengetahui apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017– 2022.
- c. Meningkatkan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dan menciptakan pengelolaan pemerintahan yang efisien, bersih dan bertanggungjawab demi mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.7 Sistematika Penulisan LKIP

LKIP BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang Dasar Hukum Penyusunan LKIP, Maksud Dan Tujuan Penyusunan LKIP, Data Organisasi Dan Sistematika Penulisan LKIP.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran organisasi.

BAB 4 PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2022 telah menyusun Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan strategis dan sebagai tolak ukur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 s.d 2022 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran seperti diuraikan dalam Bab ini.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka BPBD Provinsi DKI Jakarta diberikan tugas menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, saat bencana, pasca bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, BPBD Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1). RPJMD 2017-2022;
- 2). Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022;
- 3). Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

2.1.1 RPJMD 2017-2022

Adapun visi dan misi, Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak dicapai dalam Pembangunan Jangka Panjang untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu

“Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”

Visi ini dimaksudkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju, lestari, dan berbudaya dengan melibatkan masyarakat Jakarta secara aktif dalam proses pembangunan kota. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Jakarta yang beradab, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan ke dalam Misi.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut tentunya harus diikuti dengan Misi yang pada dasarnya merupakan pernyataan penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah:

Adapun Misi ke-1 dengan sasaran “Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana” Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas dan berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;

- 2) Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
- 3) Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas;
- 4) Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang mempekuat daya dukung lingkungan dan sosial;
- 5) Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari RPJMD Sesuai dengan isu-isu strategis, BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung peran tersebut, BPBD harus mampu melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat Jakarta terutama di daerah rawan bencana, melalui penanganan bencana maupun pemulihan, memberikan fasilitasi aman bencana terhadap fasilitas publik, membentuk Kelurahan Tangguh bencana dengan memberdayakan masyarakat di lokasi rawan bencana, serta meningkatkan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi. Dengan mempertimbangkan peran diatas, yang akhirnya diharapkan masyarakat Jakarta tangguh dan berketahanan menghadapi bencana, sehingga sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah mewujudkan pengurangan risiko bencana.

2.1.2 Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

a. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 adalah: **“Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”**

Visi ini dimaksudkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju, lestari, dan berbudaya dengan melibatkan masyarakat Jakarta secara aktif dalam proses pembangunan kota. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Jakarta yang beradab, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan ke dalam misi. Dari kelima Misi RPJMD DKI Jakarta, BPBD Provinsi DKI Jakarta secara khusus menunjang tercapainya misi ke-1 yaitu **Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan** dengan sasaran **“Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana”**.

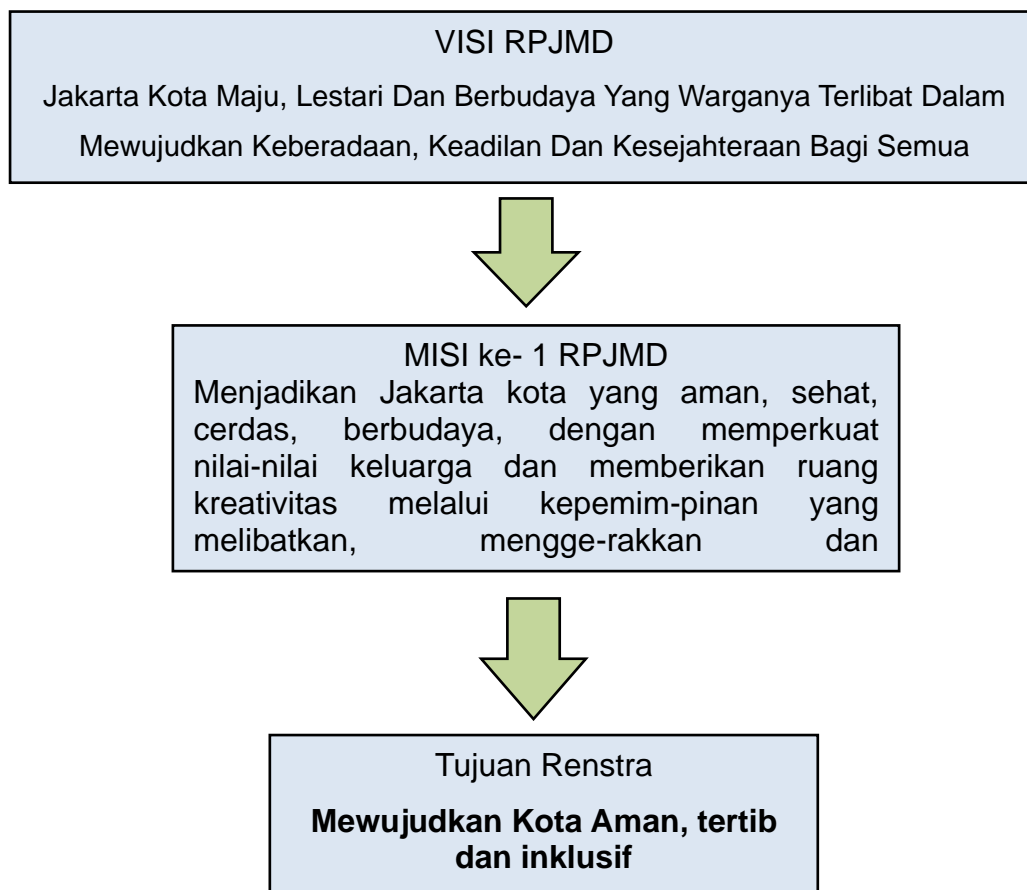
b. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan isu-isu strategis, BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung peran tersebut, BPBD harus mampu melakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat Jakarta terutama di daerah rawan bencana, melalui penanganan bencana maupun pemulihan, memberikan fasilitasi aman bencana terhadap fasilitas publik, membentuk Kelurahan Tangguh bencana dengan memberdayakan masyarakat di lokasi rawan bencana, serta meningkatkan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi. Dengan mempertimbangkan peran diatas, yang akhirnya

diharapkan masyarakat Jakarta tangguh dan berketahanan menghadapi bencana, sehingga sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah mewujudkan pengurangan risiko bencana melalui :

- 1) Persentase relawan serta potensi masyarakat lainnya yang mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana.
- 2) Persentase aparatur dan masyarakat yang diberikan pemahaman terhadap upaya pengurangan risiko bencana di kelurahan.
- 3) Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan.
- 4) Persentase fasilitas publik dan gedung bertingkat aman bencana yang diberikan pembinaan.
- 5) Persentase pembinaan implementasi sekolah/madrasah aman bencana.
- 6) Jumlah kebijakan dan kebijakan teknis pengurangan Risiko Bencana yang disusun.
- 7) Persentase pendampingan fisik dan sosial ekonomi pasca bencana sesuai rekomendasi hasil assesment.
- 8) Persentase kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam.
- 9) Persentase Kaji cepat bencana yang diselesaikan.
- 10) Presentase informasi rencana aksi strategis daerah yang disebarluaskan.
- 11) Persentase penyampaian data dan informasi kebencanaan pada pra, tanggap dan pasca bencana kepada masyarakat dan kepada pengambil keputusan dan/ atau pembuat kebijakan.
- 12) Persentase Service Level (SL) layanan pengaduan melalui call center 112.

Gambar 2.1 Keterkaitan Tujuan Renstra BPBD dengan RPJMD 2017-2022



Perumusan tujuan tersebut sudah mempertimbangkan keselarasan dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 seperti yang digambarkan pada Gambar diatas Keselarasan antara dokumen Renstra SKPD dengan RPJMD penting karena pencapaian RPJMD ditunjang oleh kinerja setiap SKPD. Tujuan jangka menengah BPBD mendukung misi ke-1 RPJMD.

Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diciptakan oleh BPBD dalam lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu, setiap unsur BPBD bekerja dengan mempedomani tujuan tersebut. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mempertimbangkan kaitannya dengan pencapaian tujuan BPBD jangka menengah.

Sedangkan sasaran yang harus diwujudkan yaitu: **Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana**. Sebagai salah satu instrumen monitoring, maka setiap sasaran memiliki indikator dan target capaian. Pencapaian target

sasaran akan menjadi ukuran kinerja BPBD setiap tahunnya. Ringkasan tujuan, sasaran, indikator, dan target terdapat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Program BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

No	Program	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	Mengukur jumlah kelurahan rawan bencana yang diberikan informasi kebencanaan
			2. Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	0	0,54	0,62	0,7	0,78	Mengukur jumlah aparatur, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan PB
			3. Persentase Implementasi Fasilitas Publik Aman serta Ketahanan Masyarakat Jakarta terhadap Bencana	0	19,75	26,33	32,92	39,5	Mengukur jumlah fasilitas publik dan gedung yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana
			4. Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	0	100	100	100	100	Mengukur persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana
			5. Persentase kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam	0	100	100	100	100	Mengukur Persentase pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi Standar kebutuhan pengungsi berdasarkan PP Nomor 21 tahun 2008

c. Kebijakan

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun kedepan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPBD Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan 3 (tiga) strategi, dengan penjelasan masing-masing strategi dan tabel sebagai berikut :

a) Memaksimalkan dan pengintegrasian upaya Pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana menjadi tolok ukur yang utama dalam mewujudkan kota dan masyarakat tangguh bencana. Pencapaian ini harus meningkatkan kapasitas masyarakat Jakarta terutama yang berada di wilayah rentan terhadap bencana, menyediakan fasilitas publik yang memadai, membentuk kelurahan tangguh bencana serta pemberdayaan masyarakat, stake holder yang difasilitasi oleh system informasi kebencanaan, sehingga arah kebijakan mencapai kota dan masyarakat yang berketahanan terhadap bencana adalah :

- Menyusun dan mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana daerah
- Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara lintas sektoral dan terintegrasi
- Optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana dan penanganan layanan komunikasi kedaruratan secara sistematis, terintegrasi, dan akurat
- Meningkatkan pemahaman pemilik dan pengelola gedung tinggi dan fasilitas umum terhadap resiko/ ancaman bencana

b) Optimalisasi pelaksanaan penanganan darurat dan pasca bencana.

Penanganan darurat bencana dan pasca bencana dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait melalui koordinasi BPBD Provinsi DKI Jakarta yang diawali pelaksanaan asesment untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada saat bencana. Demikian halnya pengendalian pada pasca bencana

dilaksanakan asesment untuk mengetahui jumlah kerusakan dan kerugian untuk ditindaklanjuti oleh SKPD terkait, sehingga arah kebijakan adalah :

- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- Meningkatkan jumlah petugas kaji cepat saat dan pasca bencana
- Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan logistic
- Mengoptimalkan pengendalian ketika terjadi bencana
- Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi teknologi pasca bencana.

c) Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD

Kelembagaan BPBD masih memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini disebabkan keberadaan, kelembagaan BPBD masih baru terbentuk dan tidak mempunyai perpanjangan tangan di tingkat kota/kabupaten, sehingga arah kebijakan adalah :

- Menyesuaikan komposisi jumlah pegawai dalam jabatan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK)
- Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang penanggulangan bencana.
- Menyiapkan SDM yang ahli dalam penelitian dan pengembangan pemetaan resiko bencana
- Monitoring kinerja organisasi yang ada berdasarkan kebutuhan
- Meningkatkan ketersediaan memadainya sarana dan prasarana kerja.

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
BPBD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

Visi	Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaan, Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Semua		
Misi 1	Menjadikan Jakarta kota yang aman, <i>sehat, cerdas, berbudaya</i> , dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, mengge-rakkan dan memanusiaikan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Mewujudkan Kota Aman, tertib dan inklusif	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	1. Memaksimalkan dan pengintegrasian upaya Pengurangan risiko bencana	1.1 Menyusun dan mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana daerah 1.2 Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara lintas sektoral dan terintegrasi 1.3 Optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana dan penanganan layanan komunikasi kedaruratan secara sistematis, terintegrasi, dan akurat 1.4 Meningkatkan pemahaman pemilik dan pengelola gedung tinggi dan fasilitas umum terhadap resiko/ ancaman bencana
		2. Optimalisasi pelaksanaan penanganan darurat dan pasca bencana	2.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 2.2. Meningkatkan jumlah petugas kaji cepat saat dan pasca bencana 2.3. Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan logistic 2.4. Mengoptimalkannya pengendalian ketika terjadi bencana 2.5. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi teknologi pasca bencana. 2.6. Meningkatkan ketersediaan memadainya sarana dan prasarana kerja
		3. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD	3.1. Menyesuaikan komposisi jumlah pegawai dalam jabatan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) 3.2. Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang penanggulangan bencana 3.3. Menyiapkan SDM yang ahli dalam penelitian dan pengembangan pemetaan resiko bencana 3.4. Monitoring kinerja organisasi yang ada berdasarkan kebutuhan 3.5. Meningkatkan ketersediaan memadainya sarana dan prasarana kerja

2.2 Perjanjian Kinerja

2.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta serta RPJMD tahun 2018-2022.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang harus dicapai dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mewujudkan Kota Aman, tertib dan inklusif	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	1,85	1,97	2,08	2,19	2,30
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	N/A	N/A	100	91	91

2.1.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Kepala Pelaksana BPBD
Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2022**

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana.	1	Indeks Risiko Bencana	e-SAKIP	Mengukur Indeks Risiko Bencana berdasarkan probabilitas spacial frekuensi dari bahaya alam X parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan dibagi pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas : 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.	N/A	N/A	66,33	N/A	66,33	Nilai

2	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana.	1	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan	e-SAKIP	<p>Definisi: Mengukur kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan Provinsi DKI Jakarta, dengan menggunakan parameter : SDM (50%), Sarana dan Prasarana (35%) serta Kesiapsiagaan Masyarakat (15%) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p> <p>Metode Pengukuran: (Konsolidasi Lokasi) Bobot BPBD dalam tiap parameter sebesar: SDM 30%, Sarana dan Prasarana 20% serta Kesiapsiagaan Masyarakat 20%</p> <p>1. SDM: Persentase kecakapan aparatur dalam melaksanakan tugas ((pegawai bersertifikat kebencanaan / jumlah pegawai BPBD x 100%) x Bobot SKPD x Bobot parameter)/10)</p> <p>2. Sarana dan Prasarana: Persentase kesiapan pemanfaatan fungsi peralatan/sarana kerja ((KDO dan perahu layak fungsi / jumlah KDO x 100%) x Bobot SKPD x Bobot parameter)/10)</p> <p>3. Kesiapsiagaan Masyarakat: Persentase layanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana banjir dan peningkatan kapasitas serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana ((jumlah kelurahan terpasang sistem peringatan dini / jumlah kelurahan rawan banjir) x Bobot SKPD x Bobot parameter)/10)</p> <p>Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	N/A	N/A	N/A	2,1	2,1	Indeks
---	---	---	--	---------	--	-----	-----	-----	-----	-----	--------

3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$</p> <p>2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p> <p>3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p>	N/A	N/A	N/A	91	91%	Persen
---	--	---	--	---------	---	-----	-----	-----	----	-----	--------

4	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak nomor (13)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor(13)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor(39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor(63)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
7	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah (67)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah (67)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim nomor (72)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor(72)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
Sasaran Khusus											

8	Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi	1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar	e-Kinerja	<p>Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya 1. Air Bersih, 2. Pangan, 3. Sanitasi, 4. Hunian Sementara, 5. Sandang, 6. Pelayanan Kesehatan, yang mengacu pada Peraturan Kepala BNPB tentang Pemenuhan Kebutuhan Dasar no 7 tahun 2008.</p> <p>1. Terpenuhinya kebutuhan Air Bersih : PDAM 2. Terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Air Minum : BPBD dan Dinas Sosial 3. Terpenuhinya kebutuhan Sanitasi : Dinas Lingkungan Hidup 4. Terpenuhinya kebutuhan Hunian Sementara : BPBD dan Dinas Sosial 5. Terpenuhinya kebutuhan Sandang : BPBD dan Dinas Sosial 6. Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kesehatan : Dinas Kesehatan</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP

11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfoitk menyusun editorial plan di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfoitk.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.</p> <p>Perhitungan :</p> <p>a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan.</p> <p>d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
----	---	---	---	-----------	---	------	------	------	------	------	------------

12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/ Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai :81)	N/A	N/A	N/A	81	81	Predikat
13	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMP RB Perangkat Daerah	e-SAKIP	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Cara penghitungan : Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30	N/A	N/A	N/A	92%	92%	Persen
Sasaran Operasional											
14	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

15	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima Tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta disusun dari kontribusi masing-masing bidang dan Unit Pelaksana Teknis, sehingga menghasilkan suatu rangkuman mengenai capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan pencapaian kinerja program. Metode perbandingan pencapaian kinerja program dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang akan menghasilkan suatu pencapaian target kinerja program dan indikator yang digunakan adalah *input*, *output* dan *outcome* yang selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuannya, rencana dan realisasinya. Untuk indikator kinerja *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) belum disajikan karena sulitnya dalam proses pengumpulan data mengingat pencapaian indikator kinerja berupa *benefit* dan *impact* sangat terkait dengan tujuan akhir kegiatan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Organisasi, sasaran strategis yang telah ditetapkan telah berhasil diwujudkan. Suatu Sasaran dapat dikatakan berhasil apabila indikator keberhasilannya dapat diwujudkan sebesar 80% atau lebih.

Gambaran capaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta secara lengkap dapat dilihat pada Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

**Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Sasaran Strategis				
1.	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana.	Indeks Risiko Bencana	66,33	62,58
		Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan	2,1	2,3
2	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	93,14%
4	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak nomor (13)	100%	100%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor(39)	100%	100%
		Realisasi rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61)	100%	100%
6	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah (67)	100%	100%
7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim nomor (72)	100%	100%
Sasaran khusus				
8	Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3 (WTP)	3 (WTP)

11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	91	92,91
13	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMP RB Perangkat Daerah Tahun 2022	95%	95,5%
14	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Prosentase Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100%	100%
15	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	100%
Sasaran Operasional				
16	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%
16	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%

Dari hasil tabel capaian perjanjian kinerja BPBD Provinsi tersebut diatas dapat dilihat bahwa semua realiasi dapat dicapai sesuai target. Pada beberapa indikator bahkan dapat melampaui target seperti Pada target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran realisasi melebihi target yaitu 93,14% dari target sebesar 91%. Sedangkan untuk indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 yang mencapai Nilai 92,91 dari target 91.

Sedangkan untuk pencapaian indikator Program Renstra BPBD pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Program	Indikator Program	Target 2022	Capaian	Keterangan
1.	Program Penanggulangan bencana	Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat	100%	100%	Mengukur jumlah kelurahan rawan bencana yang diberikan informasi kebencanaan
2		Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	0,7	0,78	Mengukur jumlah aparatur, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan
3		Persentase Implementasi Fasilitas Publik Aman serta Ketahanan Masyarakat Jakarta terhadap Bencana	32,92	39,5	Mengukur jumlah fasilitas publik dan gedung yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana
4		Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	100	100	Mengukur persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana
5		Persentase kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam	100	100	Mengukur Persentase pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi Standar kebutuhan pengungsi berdasarkan PP Nomor 21 tahun 2008

Untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, maka besaran alokasi dan realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel Data Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Serapan	%
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1.05.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.380.000	22.320.100	99,73
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.969.758.784	24.539.567.134	87,74
1.05.01.1.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7.000.000	6.985.800	99,80
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.275.374.087	1.247.330.155	97,80

1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	412.881.500	412.881.500	100%
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	197.238.580	116.224.000	77,98
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.923.200	74.424.000	99,30
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	767.300.674	694.799.853	90,55
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.310.680	58.945.440	99,38
1.05.01	Program Penanggulangan Bencana			
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	5.616.990.326	4.740.287.841	84,39
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	352.034.752	348.553.752	99,01
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	606.900.000	513.200.000	84,56
1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	22.365.217.233	22.094.552.015	98,79
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.958.504.373	1.865.166.505	95,23
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	426.601.800	418.096.680	98,01
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	1.532.700.000	1.399.200.000	91,29
1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	14.250.000	14.250.000	100
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	191.945.000	163.779.000	85,33
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6.778.455.090	6.514.200.275	96,10

3.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Hasil pengukuran kinerja tahun 2022 akan dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang telah ditetapkan yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja program. Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing IKU di Perangkat Daerah, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (BPBD)	Nilai	2,1	2,3
	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (gabungan)	Nilai	6,45	7,32
2	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	persen	91	93,14

Berdasarkan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing IKU, terdiri dari :

a. Capaian IKU Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah

Indikator Kinerja Utama Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah merupakan Indikator Sasaran RPJMD 2017-2022 merupakan realisasi gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan 3 parameter perhitungan, yaitu Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Kesiapsiagaan Masyarakat DKI Jakarta.

Beberapa hal yang menjadi faktor capaian Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah antara lain yaitu :

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada Parameter SDM tetap bisa terlaksana dengan dilakukan secara daring dapat meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana
- Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana terkait peralatan penanggulangan bencana BPBD bisa melaksanakan beberapa Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) untuk mendukung upaya penanggulangan bencana.

- Parameter Kesiapsiagaan Masyarakat DKI Jakarta didukung oleh kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Relawan serta Potensi Masyarakat lainnya dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang bisa tetap dilaksanakan secara daring dan melibatkan 2000 orang peserta yang dilatih dan ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait penanggulangan bencana

b. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Capaian Persentase Serapan Pelaksanaan Anggaran BPBD provinsi DKI Jakarta tercapai sebesar 93,14% atau melebihi target. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan sudah lebih matang sesuai perencanaan yang disusun oleh masing-masing bidang atau unit.
- Beberapa kegiatan yang dilakukan secara melalui metode *e catalog* sehingga harga penawaran sesuai dengan HPS.
- Selain into beberapa kegiatan dilakukan dengan metode Swakelola Tipe 1 sehingga penyerapan lebih maksimal.

c. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Utama pada BPBD Provinsi DKI Jakarta dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (renstra) dari tahun 2018 sd 2022.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 s.d 2022

No	IKU	Target					Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (BPBD)	1,85	1,97	2,08	2,19	2,1	1,92	2,09	1,69	2,15	2,3
	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (Gabungan)	5,28	6,08	6,77	7,32	6,91	5,69	6,19	5,89	6,72	7,32
2	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	N/A	N/A	100	91	91	90,48	90,94	85,23	90,23	93,14

Berdasarkan tabel capaian IKU tahun 2018 s.d tahun 2022 diatas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dikatakan memenuhi target yang ditentukan. Hanya pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 gelombang pertama terjadi refocusing anggaran sehingga capaian indikator tidak memenuhi target yang ditentukan.

3.3 Indikator Penunjang Lainnya

3.3.1 Kegiatan Strategis Daerah

Kegiatan Strategis Daerah				
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak nomor (13)	100%	100%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor(39)	100%	100%
3		Realisasi rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61)	100%	100%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	100%	100%
5	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah (67)	100%	100%
6		Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim nomor (72)	100%	100%

3.3.2 Sasaran Khusus

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%
2	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	388%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3	3
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	81	92,83
6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMP RB Perangkat Daerah	92%	98%

3.3.3 Sasaran Operasional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi

Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan berbagai komponen, seperti sistem manajemen organisasi, sumberdaya anggaran, SDM/personil (termasuk profesionalisme), jaringan koordinasi dengan instansi terkait, peran serta masyarakat, serta prasarana dan sarana operasional. Sistem Pengurangan resiko bencana dan penanganan darurat bencana belum dilaksanakan secara maksimal dan terintegrasi. Sistem pengurangan resiko bencana dan penanganan darurat bencana merupakan cara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai ketahanan masyarakat Jakarta dalam menghadapi bencana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan tugas Bersama antara Pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha, sehingga diperlukan sinergitas dalam pengelolaannya. Namun demikian, pada kenyataannya sangat sulit untuk mengkoordinasikan implementasi dilapangan karena berbagai hal yang dihadapi, diantaranya :

- a. Kurangnya kesadaran/pemahaman aparat dan masyarakat terhadap ancaman bencana.

Permasalahan Jakarta yang sangat kompleks, seperti kepadatan penduduk, topografi wilayah 40 % berada dibawah permukaan laut, perlintasan beberapa aliran sungai dari hulu ke hilir, menjadikan Jakarta rentan terhadap bencana. Kerentanan ini tidak diimbangi dengan kemampuan aparat dan masyarakat Jakarta untuk mengurangi resiko bencana. Masih banyaknya masyarakat Jakarta yang masih berada disepanjang pinggir sungai yang melintas ditambah beban kepadatan penduduk yang sering mengakibatkan tingginya potensi terjadinya bencana.

- b. Masih rendahnya kebijakan penanggulangan bencana daerah

Keberhasilan penanggulangan bencana dapat dicapai dengan adanya kolaborasi pelaksanaan antara Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Usaha. Tidak berjalan sektoral, tetapi bekerja bergandengan tangan dan satu konsep pola pikir, agar pencapaian penanggulangan bencana tersebut tidak sektoral akan tetapi masing-masing pihak memahami hak, kewenangan dan kewajibannya didalam pengelolaan penanggulangan bencana. Untuk mengatur

hak, kewenangan dan kewajiban ini perlu ada legalitas Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan bencana dari tingkat provinsi sampai ke tingkat yang paling bawah, sehingga jelas siapa berbuat apa, tidak terdapat duplikasi kewenangan, hak dan kewajiban.

- c. Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan

Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta *ex officio* Sekretaris Daerah, hal ini mengamanatkan bahwa seluruh SKPD terkait tugas dan fungsi penanggulangan bencana berada dibawah Kepala BPBD. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian tugas SKPD/UKPD terkait penanggulangan bencana sudah mengatur semua tugas-tugas SKPD/UKPD tersebut dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Namun demikian tugas-tugas tersebut belum dilakukan secara optimal, masih diperlukan penegasan tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD di lapangan yang dikoordinasikan oleh BPBD.

- d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana masih bersifat sektoral

BPBD Provinsi DKI Jakarta terbentuk tahun 2011 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 46 Tahun 2008. Sebelum tahun 2011, penanggulangan bencana dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsinya, sehingga setiap perangkat daerah sudah memiliki sumber daya yang handal dalam pelaksanaan tugasnya. Karena perangkat daerah sudah melakukan tugas nya dengan baik sesuai SOP, maka kehadiran BPBD dititikberatkan kepada fungsi koordinasi dan komando, tugas pelaksana hanya sebagai pendukung. Namun kenyataannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tiga tahapan, BPBD sering kesulitan dalam koordinasi tersebut, karena Perangkat Daerah masih sering berjalan sendiri-sendiri.

- e. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana secara sistematis, terintegrasi, dan akurat

Data dan Informasi bencana merupakan data yang sangat penting dikonsumsi masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Data yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga perlu proses verifikasi, agar informasi yang disampaikan tepat, akurat dan cepat. Informasi yang diterima oleh masyarakat bersumber dari berbagai instansi atau

lembaga, sehingga sering terjadi kesimpangsiuran informasi yang berakibat kesalahan didalam melakukan penanganan.

- f. Belum seluruhnya pemilik dan pengelola gedung tinggi memahami resiko/ ancaman bencana pada gedung bertingkat. Ancaman bencana terhadap gedung tinggi merupakan perhatian yang sangat serius, mengingat jumlah \pm 1.200 gedung bertingkat di DKI Jakarta, belum memahami penyelamatan diri terhadap ancaman bencana kebakaran dan gempa bumi. Ancaman ini tidak dapat diprediksi kejadiannya, dapat dibayangkan kalau terjadi pada siang hari, berapa banyak nyawa yang terancam yang perlu diselamatkan.
- g. Rendahnya kapasitas teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Terdapat 25 Kelurahan titik rawan banjir dan 55 Kelurahan titik rawan kebakaran di Wilayah DKI Jakarta. Di lokasi titik rawan ini sering terjadi bencana secara berulang-ulang, sehingga diperlukan kapasitas teknis penyelamatan dan pertolongan korban bencana baik dari aparat maupun masyarakat. Ketersediaan aparat dan masyarakat ini harus diberi dan ditingkatkan kemampuan kapasitasnya secara terus menerus, karena secara generasi, pergantian tersebut juga harus diperhatikan, agar penanganan dapat terlaksana dengan maksimal.

3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022. Akan tetapi ada masa peralihan yaitu saat penyusunan anggaran tahun 2019, masih mengacu pada RPJMD periode 2013-2017 karena RPJMD 2017-2022 masih proses penyusunan. Kebijakan ini mengakibatkan adanya perbedaan program dan indikator program yang digunakan pada tahun 2019 dengan tahun 2019-2022. Selain itu pada Tahun Anggaran 2022 nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.6 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta TA. 2022 seperti tabel dibawah ini

Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022

Kategori Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	Prosentase (%)
Belanja Langsung	53.204.482.414	51.069.571.920	95,99%
- Barang Jasa	41.131.632.729	39.877.322.487	96,95%
- Modal	12.072.849.685	11.192.249.433	92,71%
Belanja Tidak Langsung	27.969.758.784	24.539.567.134	87,74%
- Pegawai	27.969.758.784	24.539.567.134	87,74%
TOTAL	81.174.241.198	75.609.139.054	93,14%

Dilihat dari capaian penyerapan diatas dapat dikatakan bahwa penyerapan BPBD Provinsi DKI Jakarta pada Tahun anggaran 2022 berhasil mencapai target sesuai perjanjian kinerja sebesar 91%

3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Pengukuran perbandingan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dan 2022 terlihat pada tabel berikut ini

Tabel Perbandingan anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2021 dan 2022

Kategori Belanja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Pagu (Rp)	Serapan (Rp)	(%)	Pagu (Rp)	Serapan (Rp)	(%)
Belanja Langsung	46.071.978.239	40.754.851.670	88,46%	53.204.482.414	51.069.571.920	95,99%
- Barang Jasa	34.682.915.210	30.788.786.120	88,77%	41.131.632.729	39.877.322.487	96,95%
- Modal	11.389.063.119	9.966.065.550	87,51%	12.072.849.685	11.192.249.433	92,71%
Belanja Tidak Langsung	24.903.834.643	23.288.207.801	93,51%	27.969.758.784	24.539.567.134	87,74%
- Pegawai	24.903.834.643	23.288.207.801	93,51%	27.969.758.784	24.539.567.134	87,74%
Total	70.975.812.882	64.043.059.471	90,23%	81.174.241.198	75.609.139.054	93,14%

Berdasarkan tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi anggaran Tahun 2021 dan 2022 diatas maka dapat dikatakan bahwa tingkat capaian penyerapan anggaran BPBD pada tahun 2022 meningkat sebesar 103,23% dibanding tahun anggaran 2021.

3.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2022 pada tabel dibawah.

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	Realiasi	Program yang mendukung	Pagu Anggaran	Serapan	%	Efisiensi %
1	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana.	Indeks Risiko Bencana	66,33	62,58	Program Penanggulangan Bencana	39.843.598.574	38.071.286.068	95,55%	4,45%
		Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan	2,1	2,3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.786.167.505	27.173.477.982	88,27%	11,73%
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	93,14%	Program Penanggulangan Bencana	39.843.598.574	38.071.286.068	95,55%	4,45%
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.786.167.505	27.173.477.982	88,27%	11,73%

3.9 Perbandingan Dengan Target Nasional

Pada Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat diperbandingkan dengan capaian secara nasional dengan nilai IRB provinsi ataupun dengan daerah lain seperti tabel berikut: (Sumber BNPB)

Indeks Risiko Bencana Provinsi Tahun 2021 dan 2022

NO	PROVINSI	IRBI 2021	IRBI 2022	STATUS	CAPAIAN
1	ACEH	149,99	149,10	▼	TURUN
2	BALI	124,19	123,98	▼	TURUN
3	BANTEN	149,08	144,51	▼	TURUN
4	BENGKULU	157,14	155,35	▼	TURUN
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	126,34	119,56	▼	TURUN
6	DKI JAKARTA	60,43	62,58	▲	NAIK
7	GORONTALO	123,06	120,61	▼	TURUN
8	JAMBI	135,32	133,49	▼	TURUN
9	JAWA BARAT	134,94	131,62	▼	TURUN
10	JAWA TENGAH	125,73	115,38	▼	TURUN
11	JAWA TIMUR	125,86	121,70	▼	TURUN
12	KALIMANTAN BARAT	138,69	136,72	▼	TURUN
13	KALIMANTAN SELATAN	141,66	128,81	▼	TURUN
14	KALIMANTAN TENGAH	130,75	123,56	▼	TURUN
15	KALIMANTAN TIMUR	153,28	146,67	▼	TURUN
16	KALIMANTAN UTARA	157,03	157,47	▲	NAIK
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	160,98	158,52	▼	TURUN
18	KEPULAUAN RIAU	114,71	110,93	▼	TURUN
19	LAMPUNG	145,42	142,55	▼	TURUN
20	MALUKU	160,84	162,47	▲	NAIK
21	MALUKU UTARA	146,63	149,22	▲	NAIK
22	NUSA TENGGARA BARAT	122,33	119,83	▼	TURUN
23	NUSA TENGGARA TIMUR	142,52	139,23	▼	TURUN
24	PAPUA	122,38	122,15	▼	TURUN
25	PAPUA BARAT	146,46	146,77	▲	NAIK
26	RIAU	142,41	141,26	▼	TURUN
27	SULAWESI BARAT	164,85	165,23	▲	NAIK
28	SULAWESI SELATAN	154,87	150,07	▼	TURUN
29	SULAWESI TENGAH	146,07	143,44	▼	TURUN
30	SULAWESI TENGGARA	157,90	155,79	▼	TURUN
31	SULAWESI UTARA	133,29	129,62	▼	TURUN
32	SUMATERA BARAT	147,36	144,39	▼	TURUN
33	SUMATERA SELATAN	137,31	132,99	▼	TURUN
34	SUMATERA UTARA	143,83	142,51	▼	TURUN

Berdasarkan tabel diatas nilai indeks resiko bencana Provinsi DKI Jakarta berada di level sedang dan merupakan indeks resiko bencana terendah dibandingkan provinsi lain .

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil capaian perjanjian kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat dilihat bahwa semua realisasi dapat dicapai sesuai target. Pada beberapa indikator bahkan dapat melampaui target seperti Pada target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran realisasi melebihi target yaitu 93,14% dari target sebesar 91%. Sedangkan untuk indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 yang mencapai Nilai 92,91 dari target 91.

Capaian IKU tahun 2018 s.d tahun 2022 maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dikatakan memenuhi target yang ditentukan. Hanya pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 gelombang pertama terjadi refocusing anggaran sehingga capaian indikator tidak memenuhi target yang ditentukan.

Dari hasil perbandingan anggaran dan realisasi Tahun 2021 dan 2022 maka dapat dikatakan bahwa tingkat capaian penyerapan anggaran BPBD pada tahun 2022 meningkat sebesar 103,23% dibanding tahun anggaran 2021.

4.2 Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu bentuk laporan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang disusun untuk menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022.

LKIP ini disusun sebagai salah satu media akuntabilitas dan pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta atas pencapaian sasaran strategis organisasi dalam mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran kinerja tersebut bukan hanya diukur semata - mata dari pencapaian indikator kinerja yang secara normatif ditunjukkan dalam angka - angka / nilai kuantitatif akan tetapi yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dari aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta akan terus mengupayakan penyempurnaan di berbagai sisi, seperti pelaksanaan evaluasi kegiatan secara berkala oleh para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), penyelarasan program dan IKU yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Semoga laporan ini memberikan masukan/arahan guna optimalisasi dan peningkatan pencapaian kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan bahan evaluasi untuk upaya penyempurnaan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga penyusunan LKIP pada masa akan datang lebih akuntabel.

LAMPIRAN

Laporan Eselon II
KEPALA BADAN - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	66.33	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Minimize (Normal)
					TW 2				Valid	
					TW 3	66.33	60.43	108.89491934268	Valid	
					TW 4	66.33	60.43		Valid	
2	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana.	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan	nilai	2.1	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize
					TW 2				Valid	
					TW 3				Valid	
					TW 4	2.1	2.3	109.52380952381	Valid	
3	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	persen	100	TW 1	100	100	100	Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize
					TW 2	100	100	100	Valid	
					TW 3	100	100	100	Valid	
					TW 4	100	100	100	Valid	
4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	91	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize
					TW 2				Valid	
					TW 3				Valid	
					TW 4	91	93.14	102.35164835165	Valid	

Laporan Eselon III
 SEKRETARIS - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Periode 2017 - 2022
 Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	TW 1		Input (/prod_2022/sk-lapd-eselon22/ridirek? LEVEL=program&TW_ID=1&ID=10503000-A.X.XX.01-52)		Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2		Input (/prod_2022/sk-lapd-eselon22/ridirek? LEVEL=program&TW_ID=2&ID=10503000-A.X.XX.01-52)		Valid	
						TW 3	4				
						TW 4	4				
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	4	TW 1		Input (/prod_2022/sk-lapd-eselon22/ridirek? LEVEL=giat&TW_ID=1&ID=2022-10503000-1.05.01.1.01-569)		Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2		Input (/prod_2022/sk-lapd-eselon22/ridirek? LEVEL=giat&TW_ID=2&ID=2022-10503000-1.05.01.1.01-569)		Valid	
						TW 3	4				
						TW 4	4				
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan	Nilai	4	TW 1		Input (/prod_2022/sk-lapd-eselon22/ridirek? LEVEL=giat&TW_ID=1&ID=2022-10503000-1.05.01.1.02-155)		Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2		Input (/prod_2022/sk-lapd-eselon22/ridirek? LEVEL=giat&TW_ID=2&ID=2022-10503000-1.05.01.1.02-155)		Valid	
						TW 3	4				
						TW 4	4				
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	Nilai	4	TW 1		Input (/prod_2022/sk-lapd-eselon22/ridirek? LEVEL=giat&TW_ID=1&ID=2022-10503000-1.05.01.1.06-570)		Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2		Input (/prod_2022/sk-lapd-eselon22/ridirek? LEVEL=giat&TW_ID=2&ID=2022-10503000-1.05.01.1.06-570)		Valid	
						TW 3	4				
						TW 4	4				
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	TW 1		Input (/prod_2022/sk-lapd-eselon22/ridirek? LEVEL=giat&TW_ID=1&ID=2022-10503000-1.05.01.1.08-152)		Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2		Input (/prod_2022/sk-lapd-eselon22/ridirek? LEVEL=giat&TW_ID=2&ID=2022-10503000-1.05.01.1.08-152)		Valid	
						TW 3	4				
						TW 4	4				
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	TW 1		Input (/prod_2022/sk-lapd-eselon22/ridirek? LEVEL=giat&TW_ID=1&ID=2022-10503000-1.05.01.1.09-572)		Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2		Input (/prod_2022/sk-lapd-eselon22/ridirek? LEVEL=giat&TW_ID=2&ID=2022-10503000-1.05.01.1.09-572)		Valid	
						TW 3	4				
						TW 4	4				

Laporan Eselon III
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kolaborasi	Persentase kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam	%	100	TW 1	100	100	100	Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2	100	100	100	Valid	
						TW 3	100	100	100	Valid	
						TW 4	100	100	100	Valid	
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persentase	100	TW 1	100	100	100	Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2	100	100	100	Valid	
						TW 3	100	100	100	Valid	
						TW 4	100	100	100	Valid	

Laporan Eselon III
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kolaborasi	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	0.7799997138977	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3				Valid	
						TW 4	0.7799997138977	0.786	100.76923446542	Valid	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana	kelurahan	25	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3		82	100	Valid	
						TW 4	25	107	428	Valid	
		Jumlah warga yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	orang	2000	TW 1					Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
					TW 2				Valid		
					TW 3	2000	2000	100	Valid		
					TW 4	2000	2000	100	Valid		
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	jumlah aparatur, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan PB	orang	1600	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2		1600	100	Valid	
						TW 3	1600	1600	100	Valid	
						TW 4	1600	1600	100	Valid	

Laporan Eselon III
 KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Periode 2017 - 2022
 Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kolaborasi	Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	%	100	TW 1	100	100	100	Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2	100	100	100	Valid	
						TW 3	100	100	100	Valid	
						TW 4	100	100	100	Valid	

Laporan Eselon III
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN - PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan	
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kolaborasi	Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat	%	100	TW 1	100	100	100	Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2	100	100	100	Valid		
						TW 3	100	100	100	Valid		
						TW 4	100	100	100	Valid		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2	4	4	100	Valid		
						TW 3	4	4	100	Valid		
						TW 4	4	4	100	Valid		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2	4	4	100	Valid		
						TW 3	4	4	100	Valid		
						TW 4	4	4	100	Valid		
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2	4	4	100	Valid		
						TW 3	4	4	100	Valid		
						TW 4	4	4	100	Valid		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2	4	4	100	Valid		
						TW 3	4	4	100	Valid		
						TW 4	4	4	100	Valid		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2	4	4	100	Valid		
						TW 3	4	4	100	Valid		
						TW 4	4	4	100	Valid		
7	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	jumlah kunjungan media sosial BPBD Provinsi DKI Jakarta (Facebook, Twitter, Instagram) untuk mendapatkan layanan informasi kebencanaan	kali	1200000	TW 1	300000	3962960	1320.9866666667	Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2	600000	10938860	1823.1433333333	Valid		
						TW 3	900000	21429260	2381.0288888889	Valid		
						TW 4	1200000	36673760	3056.1466666667	Valid		
			Jumlah kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana	kelurahan	25	TW 1					Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2					Valid	
						TW 3	25	25	100	Valid		
						TW 4	25	25	100	Valid		
8	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase optimalisasi penyampaian informasi kebencanaan	persentase	100	TW 1	100	100	100	Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2	100	100	100	Valid		
						TW 3	100	100	100	Valid		
						TW 4	100	100	100	Valid		

Laporan Eselon IV
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIS - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan terhadap Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	4	4	100	Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
2	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah KDO/KDO Khusus yang terpenuhi kebutuhan BBM nya	Unit	60	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3				Valid	
						TW 4	60	60	100	Valid	
		Nilai kepuasan pemenuhan kebutuhan BBM dan material lainnya	nilai	4	TW 1					Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
					TW 2				Valid		
					TW 3	4	4	100	Valid		
					TW 4	4	4	100	Valid		
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasnya Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	4	4	100	Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	4	4	100	Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	Unit	60	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3				Valid	
						TW 4	60	60	100	Valid	
		Nilai kepuasan pemeliharaan dan perizinan KDO/KDO Khusus	nilai	4	TW 1					Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
					TW 2				Valid		
					TW 3	4	4	100	Valid		
					TW 4	4	4	100	Valid		
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai kepuasan terhadap Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	4	4	100	Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Khusus Kebencanaan yang tersedia	unit	5	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3		0		Valid	
						TW 4	5	5	100	Valid	

Laporan Eselon IV
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA - KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN - PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan jasa administrasi keuangan	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
						TW 2	4	4	100	Valid	
						TW 3	4	4	100	Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan alat tulis kantor	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
						TW 2	4	4	100	Valid	
						TW 3	4	4	100	Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Nilai Kepuasan Pelayanan terhadap Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
						TW 2	4	4	100	Valid	
						TW 3	4	4	100	Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
4	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah KDO/KDO Khusus yang kebutuhan BBM-nya terpenuhi	unit	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
						TW 2				Valid	
						TW 3				Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
		Nilai kepuasan pemenuhan kebutuhan BBM dan material lainnya	Nilai	4	TW 1					Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
					TW 2	4	4	100	Valid		
					TW 3	4	4	100	Valid		
					TW 4	4	4	100	Valid		
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Pelayanan terhadap Ketersediaan Makanan dan Minuman	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
						TW 2	4	4	100	Valid	
						TW 3	4	4	100	Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan perlengkapan kantor	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
						TW 2	4	4	100	Valid	
						TW 3	4	4	100	Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Terbayarnya Abodemen dan Tagihan Telepon Call Center 112 BPBD	%	100	TW 1	100	100	100	Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
						TW 2	100	100	100	Valid	
						TW 3	100	100	100	Valid	
						TW 4	100	100	100	Valid	
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Terhadap Ketersediaan Mesin Fotokopi	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
						TW 2	4	4	100	Valid	
						TW 3	4	4	100	Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO/KDOK yang memiliki surat izin	Unit	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
						TW 2				Valid	
						TW 3				Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
		Jumlah KDO/KDOK yang laik jalan/berfungsi	unit	4	TW 1					Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
					TW 2				Valid		
					TW 3				Valid		
					TW 4	4	4	100	Valid		
		Nilai kepuasan pemeliharaan dan perizinan KDO/KDO Khusus	Nilai	4	TW 1					Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
					TW 2	4	4	100	Valid		
					TW 3	4	4	100	Valid		
					TW 4	4	4	100	Valid		
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang laik fungsi	unit	20	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
						TW 2				Valid	
						TW 3				Valid	
						TW 4	20	20	100	Valid	
		Nilai kepuasan pemeliharaan kebutuhan perangkat pendukung kegiatan kantor	Nilai	4	TW 1					Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggol
					TW 2	4	4	100	Valid		
					TW 3	4	4	100	Valid		
					TW 4	4	4	100	Valid		

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan terhadap kebersihan kantor	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2	4	4	100	Valid		
						TW 3	4	4	100	Valid		
						TW 4	4	4	100	Valid		
12	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah lokasi terpasangnya poster dan leaflet mengenai Layanan Jakarta Siaga 112 dan aplikasi Jakarta Aman	lokasi	25	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2				Valid		
						TW 3		25	100	Valid		
						TW 4	25	25	100	Valid		
13	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	jumlah laporan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	laporan/bulan	58	TW 1	58	58	100	Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2	58	58	100	Valid		
						TW 3	58	58	100	Valid		
						TW 4	58	58	100	Valid		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan	Laporan	2	TW 1					Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid		
						TW 3				Valid		
						TW 4	2	2	100	Valid		
			Jumlah laporan termanfaatkannya DIMS, EWS, medsos dan call center 112	Laporan	24	TW 1	6	6	100	Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2	12	12	100	Valid		
						TW 3	18	18	100	Valid		
						TW 4	24	24	100	Valid		
			Jumlah peralatan Early Warning System (EWS) yang beroperasi	unit	31	TW 1					Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid		
						TW 3				Valid		
						TW 4	31	35	112.90322580645	Valid		

Laporan Eselon IV
SUBKOORDINATOR URUSAN PROGRAM DAN ANGGARAN - SEKRETARIS - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2022-2027	Dokumen	1	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2	1	1	100	Valid	
						TW 3	1	1	100	Valid	
						TW 4	1	1	100	Valid	
2		Meningkatnya Kinerja Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	dokumen	2	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize
						TW 2	1	1	100	Valid	
						TW 3	1	1	100	Valid	
						TW 4	2	2	100	Valid	

Laporan Eselon IV
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN - SEKRETARIS - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji atau tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Bulan	14	TW 1	3	3	100	Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2	7	7	100	Valid		
						TW 3	11	11	100	Valid		
						TW 4	14	14	100	Valid		
			Persentase Pembayaran Gaji atau Tunjangan ASN tepat waktu sesuai ketentuan	%	100	TW 1	100	100	100	Valid		Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2	100	100	100	Valid		
						TW 3	100	100	100	Valid		
						TW 4	100	100	100	Valid		
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan jasa administrasi keuangan	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2				Valid		
						TW 3	4	4	100	Valid		
						TW 4	4	4	100	Valid		
3	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan dan anggaran	dokumen	4	TW 1	1	1	100	Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize	
						TW 2	2	2	100	Valid		
						TW 3	3	3	100	Valid		
						TW 4	4	4	100	Valid		
			Jumlah Laporan Keuangan yang tervalidasi melalui rekonsiliasi dan review	dokumen	2	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize	
						TW 2	1	1	100	Valid		
						TW 3	1	1	100	Valid		
						TW 4	2	2	100	Valid		
			Jumlah laporan monitoring analisa, evaluasi manfaat dan akuntansi asset	dokumen	2	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize	
						TW 2	1	1	100	Valid		
						TW 3	1	1	100	Valid		
						TW 4	2	2	100	Valid		

Laporan Eselon IV
SUBKOORDINATOR URUSAN PENCEGAHAN - KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah simulator kebencanaan yang tersedia	Unit	2	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	2	3	150	Valid	
						TW 4	2	3	150	Valid	
2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta yang tersedia	Dokumen	1	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	1	1	100	Valid	
						TW 4	1	1	100	Valid	
3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Fasilitas Publik dan Gedung yang meningkat kapasitasnya dalam penanggulangan PB	Gedung	15	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	15	15	100	Valid	
						TW 4	15	15	100	Valid	
4	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersusunnya Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Review Rencana Kontijensi Banjir yang tersedia	Dokumen	1	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3		1	100	Valid	
						TW 4	1	1	100	Valid	

Laporan Eselon IV
SUBKOORDINATOR URUSAN KESIAPSIAGAAN - KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah sekolah/madrasah yang terbina	sekolah/madrasah	18	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	18	18	100	Valid	
						TW 4	18	18	100	Valid	
		Jumlah Gladi posko, gladi lapang dan apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan	Kali	20	TW 1					Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
					TW 2				Valid		
					TW 3	20	20	100	Valid		
					TW 4	20	20	100	Valid		
2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tersusnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta yang tersedia	Dokumen	1	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	1	1	100	Valid	
						TW 4	1	1	100	Valid	
3	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan piket siaga bencana	Laporan	12	TW 1	3	3	100	Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2	6	6	100	Valid	
						TW 3	9	9	100	Valid	
						TW 4	12	12	100	Valid	

Laporan Eselon IV
SUBKOORDINATOR URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA - KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah lokasi Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kelurahan Tangguh Bencana	Lokasi	20	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3				Valid	
						TW 4	20	20	100	Valid	
2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tersusunya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta yang tersedia	Dokumen	1	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	1	1	100	Valid	
						TW 4	1	1	100	Valid	
3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	jumlah aparat, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan PB	orang	1600	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2	1600	1600	100	Valid	
						TW 3	1600	1600	100	Valid	
						TW 4	1600	1600	100	Valid	
4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah laporan Pemantauan, Peninjauan dan Evaluasi Kawasan Rawan Bencana	Laporan	5	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3				Valid	
						TW 4	5	5	100	Valid	
		Jumlah kegiatan operasional sekretariat bersama yang terlaksana	kegiatan	12	TW 1	3	3	100	Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
					TW 2	6	6	100	Valid		
					TW 3	9	9	100	Valid		
					TW 4	12	12	100	Valid		

Laporan Eselon IV
SUBKOORDINATOR URUSAN PENGENDALIAN DAN OPERASI - KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Petugas Penanggulangan Bencana	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	4	4	100	Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi DKI Jakarta yang meningkat kapasitasnya	orang	267	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	267	267	100	Valid	
						TW 4	267	267	100	Valid	
3	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana DKI Jakarta yang meningkat kapasitasnya dalam PB	Orang	267	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	267	267	100	Valid	
						TW 4	267	267	100	Valid	

Laporan Eselon IV
SUBKOORDINATOR URUSAN KEDARURATAN DAN PENANGANAN PENGUNGSI - KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Nilai kepuasan terhadap penyediaan jasa petugas penanganan bencana	Nilai	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	4	4	100	Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah laporan Pembinaan Tim Reaksi Cepat	laporan	4	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2	2	2	100	Valid	
						TW 3	4	4	100	Valid	
						TW 4	4	4	100	Valid	
3		Terwujudnya penanganan dan pengelolaan pengungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi korban bencana	%	100	TW 1	100	100	100	Valid	Konsolidasi : Average Polarisasi : Stabilize
						TW 2	100	100	100	Valid	
						TW 3	100	100	100	Valid	
						TW 4	100	100	100	Valid	

Laporan Eselon IV
SUBKOORDINATOR URUSAN LOGISTIK DAN PERALATAN - KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan penanggulangan bencana yang tersedia	jenis	6	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3				Valid	
						TW 4	6	6	100	Valid	
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah buffer stock logistik yang tersedia	jenis	27	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3				Valid	
						TW 4	27	27	100	Valid	

Laporan Eselon IV
SUBKOORDINATOR URUSAN PERHITUNGAN KERUSAKAN - KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah laporan Pengembangan dan Pemutakhiran Data Pada Aplikasi JakSAFE yang tersedia	Laporan	1	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3				Valid	
						TW 4	1	1	100	Valid	
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Bagi Aparatur	Kegiatan	5	TW 1					Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
					TW 2				Valid		
					TW 3	5	5	100	Valid		
					TW 4	5	5	100	Valid		

Laporan Eselon IV
SUBKOORDINATOR URUSAN PEMULIHAN DAN PENINGKATAN FISIK - KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan
1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang tersedia	Jenis	10	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3	10	10	100	Valid	
						TW 4	10	10	100	Valid	
2	Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumah laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam pemulihan fisik pasca Bencana	Laporan	1	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid	
						TW 3				Valid	
						TW 4	1	1	100	Valid	

Laporan Eselon IV
SUBKOORDINATOR URUSAN PEMULIHAN DAN PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI - KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Validasi	Keterangan	
1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah sarana pendukung layanan dukungan psikososial yang tersedia	jenis	9	TW 1				Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2	9	9	100	Valid		
						TW 3	9	9	100	Valid		
						TW 4	9	9	100	Valid		
2	Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan dukungan psikososial pasca bencana	Orang	600	TW 1				Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal	
						TW 2				Valid		
						TW 3				Valid		
						TW 4	600	600	100	Valid		
			Jumlah masyarakat dan aparatur yang terlatih layanan dukungan psikososial	orang	150	TW 1					Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2	150	150	100	Valid		
						TW 3	150	150	100	Valid		
						TW 4	150	150	100	Valid		
			Jumlah masyarakat terdampak bencana yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	100	TW 1					Valid	Konsolidasi : Sum Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid		
						TW 3	100	100	100	Valid		
						TW 4	100	100	100	Valid		
			Jumlah pedoman pendampingan psikososial bagi masyarakat terdampak bencana yang tersedia	jenis	1	TW 1					Valid	Konsolidasi : Take Last Known (Normal) Polarisasi : Maximize Tipe PJ : Target Tunggal
						TW 2				Valid		
						TW 3				Valid		
						TW 4	1	1	100	Valid		